



APBD 2025 Tersandera AKD

APBD 2025 Tersandera AKD

REPORTER ASHARI PN-SYAHRUDDIN SYAH
EDITOR RIDWAN MARZUKI

BONE, FAJAR — Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sejumlah daerah tak kunjung terbentuk. RAPBD 2025 pun tersandera.

SITUASI ini mengakibatkan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 mulur. Draf anggaran hanya bisa dibahas antara tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dengan dewan jika AKD telah terbentuk.

Bone bersama Wajo, dan banyak daerah lain menghadapi situasi serupa. Tiga-empat partai peraih suara tertinggi, bahkan ada yang turut "menyandera" SK sehingga setwan belum bisa memproses pelantikan pimpinan.

Pembentukan AKD yang

lambat ini berpotensi membuat pembahasan RAPBD dibahas secara kilat dan minim tinjauan kritis dari para legislator.



Ishan Samin

dua dari total empat pimpinan yang dilantik, yakni wakil ketua I dari PKB dan wakil ketua III dari PPP.

Sementara ketua dan wakil ketua IV, penentuan nama-nama oleh partai, le-

let. Dua posisi terakhir ini memang sudah ada nama disetorkan oleh partai, namun butuh proses lagi ke Pemprov Sulsel untuk mendapatkan SK pengesahan.

"Untuk dua AKD pimpinan DPRD itu sementara kita sudah usulkan ke gubernur," beber Sekretaris DPRD Bone Ishan Samin, Selasa, 15 Oktober.

"Ini sementara ini kita tunggu peresmiannya dengan keputusan gubernurnya. Begitu kita terima, kita adakan rapat paripurna untuk pengucapan sumpah," sambungnya.

Itu belum AKD lainnya. Terdapat ada enam AKD di DPRD Bone, meliputi pimpinan, badan anggaran (Banggar), badan musyawarah (Bamus), badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda), komisi, dan badan kehormatan (BK).

Sebagian besar di antaranya untuk penetapan ke-

tuanya, bersifat ex-officio alias otomatis melekat dengan AKD pimpinan. Sementara sisanya dalam proses perampungan di masing-masing partai, seperti untuk ketua-ketua fraksi yang berjumlah empat kursi.

"Sementara proses, karena sementara sudah bersurat ke masing-masing fraksi untuk meminta nama dan sampai sekarang baru tiga fraksi yang sudah usulkan," kata Ishan.

DPRD Bone saat ini juga tengah merampungkan tata tertib, sehingga diharapkan ini bisa selesai bersamaan. Targetnya, paling lambat pelantikan ketua dan waket II ini bisa digelar pekan depan.

Hanya Menunggu

Soal keterlambatan pembahasan RAPBD, TAPD memaklumi kondisi ini. Mereka tak bisa berbuat banyak, sebab ini menjadi kewenangan provinsi dan partai. TAPD hanya menunggu.

"Berbicara terlambat pasti

terlambat, yang jelasnya kita upayakan dipercepat," ujar Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bone, Budiono.

Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dilaporkan sudah dilakukan oleh AKD sebelumnya, sehingga tugas dewan saat ini sisa pengesahan.

Ini membuat pembahasan panjang tak lagi harus dilakukan. Meski cukup lambat, dia memastikan ini tidak akan menyebarkan tahun. "Yang jelas tidak menyebarkan tahun 2025. Kan, KUA-PPAS sudah, sisa pengesahan, bahasan DPRD," jelasnya.

Pembahasan ini menurut Budiono belum bisa dijamin pihaknya, sebab bergantung dari DPRD sendiri. Namun, dia memastikan jika sudah ada AKD yang lengkap, maka ini akan secepatnya digodok oleh pemkab. (*)